

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat ALLAH SWT, atas berkat dan rahmat Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta Tahun 2025. LKj ini merupakan bentuk laporan dan pertanggungjawaban Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pada Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Proses kinerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKj tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan LKj adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dan perjanjian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur keberhasilan capaian kinerja. LKj ini juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKj ini kami susun, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan atau informasi bagi masyarakat khususnya untuk peningkatan kinerja Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) DKI Jakarta yang lebih baik lagi dimasa mendatang.

Jakarta, Februari 2026

KEPALA

Dr. ARMAN MUIS, SH, S.I.K, M.M

Kombes Pol. NRP 77101056

BAB I

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BP3MI 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh BP3MI beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra BP3MI telah mengacu pada Renstra Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI tahun 2025-2029. Secara ringkas substansi BP3MI dapat diilustrasikan sebagai berikut :

1. Visi

Visi BP3MI selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang diharapkan memberi arah ke masa depan yaitu: **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan dan mendukung Visi tersebut, BP3MI menetapkan 4 (empat) misi yang akan dilakukan secara konsisten, yaitu:

- a) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsif, kepada Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- c) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi, dan hubungan kelembagaan; dan
- d) Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana BP2MI.

3. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, BP3MI menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu sampai tahun 2025, yaitu:

- a) Terwujudnya perlindungan Pekerja Migran Indonesia melalui penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya sebagai aset bangsa;
- b) Terselenggaranya peningkatan tata kelola organisasi yang efisien, efektif, dan akuntabel.

4. Fungsi BP3MI Jakarta

- a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b) penyebarluasan informasi di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- c) pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil pemetaan peluang kerja luar negeri;
- d) pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- e) pelaksanaan verifikasi dokumen pekerja migran Indonesia;
- f) pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi calon pekerja migran Indonesia;
- g) pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial pekerja migran Indonesia;
- h) pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia;
- i) pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan perusahaan yang menempatkan calon pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- j) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia oleh lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
- k) pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak calon pekerja migran Indonesia/ pekerja migran Indonesia secara terpadu;

- l) pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia melalui kedeputusan teknis terkait;
- m) pencegahan dan penanganan calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan secara nonprosedural;
- n) pelaksanaan pemulangan pekerja migran Indonesia terkendala serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna pekerja migran Indonesia; pemberdayaan sosial dan ekonomi purna pekerja migran Indonesia dan keluarganya;
- o) perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia;
- p) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

B. Perjanjian Kinerja

Sebagai penjabaran tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2025, BP3MI Jakarta telah menetapkan Sasaran Strategis dan IKU yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel. I.1
Perjanjian Kinerja BP3MI DKI Jakarta Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan dan permasalahan PMI	Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%
Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%
Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI	Implementasi Kerjasama	80%

Mewujudkan Optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintragi, dan pelayanan kepulangan bagi PMI yang mengalami permasalahan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi	20 orang
	Jumlah Purna pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	20 orang
	Jumlah Fasilitasi Pelayanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit dan meninggal	223 orang
Peningkatan Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah	Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	42.010 orang
Meningkatkan Pengawasan Jaminan Sosial	Fasilitasi Klaim Jaminan sosial oleh CPMI dan PMI	100%
Meningkatkan Kapasitas Supply	Data Supply	1000 data
	Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	500 orang
	Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM	80%
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75
Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik (88)

Kegiatan**Anggaran**

1. Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Rp. 9.365.037.000
2. Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan pada BP3MI Rp. 4.742.102.000

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Triwulan

Pengukuran kinerja dilakukan dengan metode sederhana yang membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan dan dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari pencapaian sasaran kinerja dimaksud.

Laporan Kinerja Tahunan ini menyajikan pengukuran capaian kinerja BP3MI Jakarta selama Setahun dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja triwulan berikutnya. Secara rinci hasil pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. II.1
Pengukuran Capaian Kinerja
Periode Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2025	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Tahunan 2025
				Realisasi				
1	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan dan permasalahan PMI	Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%	50%	50%	35,17%	32 kasus 50%	75 Kasus 36%
2	Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI	Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SISCO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatkan Penguatan Kerjasama dalam rangka Penempatan dan Pelindungan PMI	Implementasi Kerjasama	80%	0	100%	100%	100%	100%

4	Mewujudkan Optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintragi, dan pelayanan keputungan bagi PMI yang mengalami permasalahan	Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi	20 orang	17 orang	20 Orang	24 orang	40 Orang	101 Orang
		Jumlah Purna pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan ekonomi dan sosial	20 orang	0	0	20 Orang	-	20 Orang
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan keputungan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit dan meninggal	223 orang	197 orang	101 Orang	127 orang	110 Orang	535 Orang
5	Peningkatan Layanan Penempatan PMI Non Pemerintah	Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	42.010 orang	9.622 orang	10.569 Orang	11.194 orang	10.170 Orang	41.555 Orang
6	Meningkatkan Pengawasan Jaminan Sosial	Fasilitasi Klaim Jaminan sosial oleh CPMI dan PMI	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatkan Kapasitas Supply	Data Supply	1000 Data	209 data	910 data	567 data	219 data	1905 data
		Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	500 Orang	424 orang	1.448 Orang	0	0	1.872 Orang

		Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM	80%	-	-	-	-	-
8	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75	-	-	-	-	-
9	Membangun Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja BP3MI DKI Jakarta pada tahun 2025 diukur dari seluruh pencapaian IKU. Capaian kinerja sampai tahun 2025 sebesar 148,36% yang dihitung dari rata-rata capaian 13 (tiga belas) IKU. Berikut ringkasan capaian kinerja BP3MI DKI Jakarta pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

$$\text{TOTAL PRESENTASE CAPAIAN IKU} = \frac{1928.70}{13} \times 100\% = 148,36\%^1$$

Berikut ringkasan capaian kinerja BP3MI DKI Jakarta Tahun 2025

¹ Hasil pengukuran capaian kinerja diperoleh dari Persentase Capaian dibagi dengan 13 (tiga belas) IKU

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja BP3MI DKI Jakarta Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Capaian Sasaran Program “Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Penanganan dan Permasalahan PMI.”

Tabel. II.2
 Capaian IKU “Persentase Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI.”
 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
Persentase Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	70%	75 kasus	36%

a. Informasi Kinerja

Layanan Penanganan Permasalahan yang dimaksudkan yakni penanganan permasalahan dari pengaduan yang masuk dan difasilitasi penanganannya oleh BP3MI DKI Jakarta. Permasalahan dari pengaduan yang masuk dapat secara langsung dan melalui sosial media. Untuk mengukur indikator kinerja ini berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk ke BP3MI DKI Jakarta tahun 2025 yang telah difasilitasi.

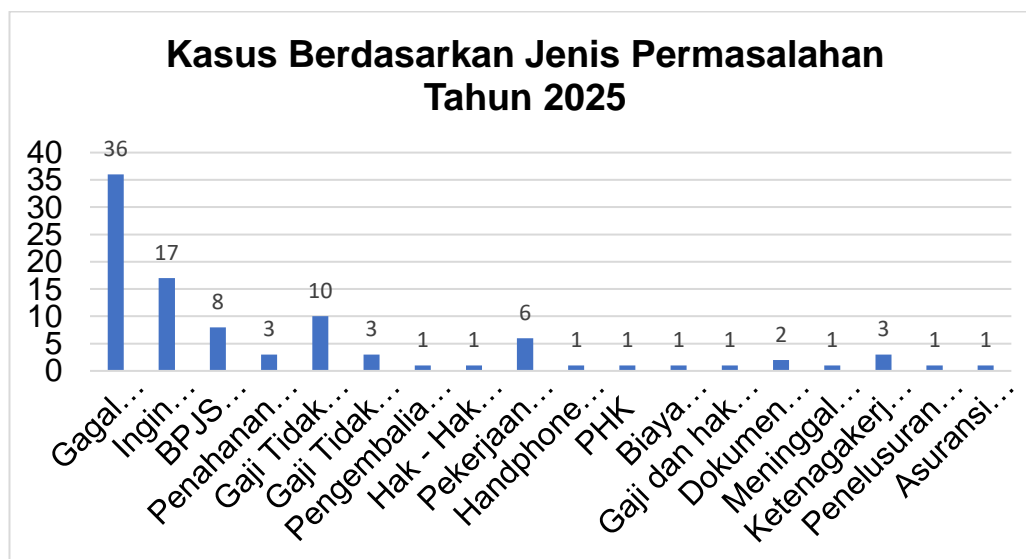
b. Evaluasi Kinerja

Target Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 70%. Adapun realisasi Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI Tahun 2025 sebanyak 75 pengaduan dan telah terfasilitasi 75 pengaduan tersebut sehingga mencapai 36% dari target tahun 2025

**Rekapitulasi Penurunan Kasus PMI
Tahun 2025
BP3MI Jakarta**

Jenis Kasus	Jumlah	Status	
		Selesai	Proses
Gagal Berangkat	29	27	2
Ingin Dipulangkan	12	9	3
Pekerjaan Tidak Sesuai PK	4	4	0
Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh P3MI	3	3	0
Gaji Tidak dibayarkan	2	2	0
Gaji tidak sesuai PK	9	9	0
BPJS Ketenagakerjaan	11	11	0
Penelusuran Alamat	1	1	0
Dokumen Ditahan	1	1	0
Asuransi Kematian	1	1	0
Pengembalian Biaya Penempatan	1	1	0
Hak - Hak (Gaji, Uang PHK, Bonus), BPJS Ketenagakerjaan, Dokumen Asli	1	1	0

Grafik. I.1
Kasus Berdasarkan Jenis Permasalahan
Tahun 2025



Berdasarkan grafik IV.6 dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2025 terdapat jenis kasus yang paling sering terjadi yaitu gagal berangkat sebanyak 36 (tiga puluh enam) kasus dan ingin dipulangkan sebanyak 17 (tujuh belas) kasus.

Dibawah ini adalah grafik kasus selama Tahun 2025 yang difasilitasi oleh BP3MI Jakarta selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu periode 2021 s.d. 2025.



Adapun kendala yang dihadapi dalam kegiatan pelayanan pengaduan mediasi dan advokasi perlindungan serta klaim jaminan sosial yaitu seperti pihak P3MI yang membutuhkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan PMI yang mengadukan permasalahannya, pihak pengadu/PMI yang sulit dihubungi, kurangnya pemahaman terkait peraturan yang berlaku baik dari pihak pengadu/PMI maupun pihak P3MI.

Masukan atau solusi yang dapat diberikan untuk kegiatan pelayanan pengaduan mediasi dan advokasi perlindungan serta klaim jaminan sosial yang tujuannya adalah dengan semakin menurunkan kasus PMI yaitu seperti melakukan sosialisasi kepada P3MI dan PMI terkait peraturan perundang – undangan, mengingatkan kembali terhadap P3MI untuk dapat memonitoring PMI yang telah diberangkatkan ke Negara penempatan sampai kembali pulang ke Indonesia, serta perlu juga untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan petugas penanganan kasus dalam bentuk bimbingan teknis ataupun kesempatan magang di instansi terkait lainnya yang berkaitan dengan PMI.

2. Capaian Sasaran Program “ Mengoptimalkan Sistem Informasi untuk Pelaporan dan Penanganan Permasalahan PMI”

Tabel. II.3
 Capaian IKU “Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI”
 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI	100%	75 Kasus	100%

a. Informasi Kinerja

Pengaduan pada SSKOP2MI (Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) adalah mekanisme untuk mengajukan laporan atau keluhan terkait dengan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). SSKOP2MI sendiri merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk mengelola data dan informasi terkait PMI.

b. Evaluasi Kinerja

Target pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI tahun 2025 adalah 100%.

Tahun 2025, kasus yang dilaporkan ke BP3MI DKI Jakarta selama Tahun 2025 sejumlah 75 kasus dan telah difasilitasi untuk ditindak lanjuti, sehingga terjadi capaian realisasi sebesar 100%. bahwa jumlah kasus pada tahun 2025 adalah sejumlah 75 kasus dengan kasus tahun 2024 sebanyak 48 kasus. Adapun jumlah kasus yang sudah diselesaikan sebanyak 68 kasus dan 7 kasus masih dalam proses penyelesaian.

Dalam hal mendukung pelindungan terhadap PMI yang memiliki masalah, BP3MI DKI Jakarta sebagai unit pelaksana teknis KP2MI mempunyai tugas yang salah

satunya adalah pelayanan pengaduan, mediasi, dan advokasi perlindungan serta klaim jaminan sosial.

Kegiatan pelayanan pengaduan atau crisis center merupakan suatu bentuk fasilitasi terhadap pengaduan permasalahan PMI baik pra, masa, dan purna yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang pengaduannya dapat dilakukan oleh PMI yang bersangkutan, pihak keluarga, kuasa hukum, maupun instansi terkait.

Tahap selanjutnya setelah kegiatan pelayanan pengaduan yaitu melakukan mediasi dan advokasi. Kegiatan mediasi adalah dengan suatu upaya penyelesaian permasalahan PMI dengan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait untuk kemudian dilakukan mediasi. Sedangkan advokasi adalah bentuk perlindungan terhadap PMI yang mengadukan permasalahannya apabila penyelesaian sengketa melalui mediasi tidak mencapai kesepakatan.

3. Capaian Sasaran Program “Meningkatkan Penguatan Kerjasama Dalam Rangka Penempatan dan Pelindungan PMI”

Tabel. II.4
Capaian IKU “Implementasi Kerjasama “
Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Implementasi Kerjasama	80%	100%	100%

a. Informasi Kinerja

Implementasi kerjasama instansi pemerintah adalah pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati antara dua atau lebih instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, misalnya meningkatkan pelayanan publik, pembangunan, atau berbagai bidang lainnya dalam bentuk perjanjian Kerjasama antar pemerintah setempat.

b. Evaluasi Kinerja

Terkait pelaksanaan kegiatan Implementasi kerjasama, sejak perubahan nomenklatur Badan menjadi Kementerian, BP3MI Jakarta telah menghasilkan suatu dokumen Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada 20 Januari 2025.

Implementasi dari dokumen kerjasama tersebut dilakukan melalui kolaborasi dalam kegiatan sosialisasi dalam mendukung pemetaan supply keberminatan bekerja ke luar negeri di berbagai Sekolah Menengah Kejuruan maupun keikutsertaan BP3MI dalam kegiatan job fair yang diadakan Dinas maupun Suku Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi dan Energi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2025.

Pada Tahun 2025 sudah terlaksana kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dalam ruang lingkup di dokumen Nota Kesepahaman, antara lain

- a. Rencana penyaluran lulusan alumni pelatihan PPKD di Wilayah DKI Jakarta dapat mendaftar dan mengikuti seleksi penempatan bekerja keluar negeri
- b. Penguatan Pemetaan supply melalui penyuluhan dan bimbingan jabatan di sekolah menengah kejuruan dan lembaga vokasi.
- c. Pengoptimalan kegiatan Jobfair sampai tingkat kecamatan di wilayah Jakarta.
- d. Kegiatan Penanganan Pelindungan PMI yang berasal dari wilayah DKI Jakarta terutama penanganan PMI sakit dan yang meninggal.

4. Capaian 3 IKU pada Sasaran Program “ Mewujudkan optimalisasi pemberdayaan untuk Purna PMI dan keluarganya serta rehabilitasi, reintegrasi, dan pelayanan keputungan bagi PMI yang mengalami permasalahan”

1) Capaian IKU Capaian IKU “Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang di fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi”

Tabel. II.5
Capaian IKU “Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang di fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi “
Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang di fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi	20 Orang	101 Orang	505%

a. Informasi Kinerja

BP3MI DKI Jakarta pada tahun 2025 ini memiliki target pelaksanaan fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi kepada orang Purna Pekerja Migran Indonesia. Rehabilitasi dan Reintegrasi ini adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami permasalahan selama bekerja di luar negeri atau setelah kembali ke Indonesia. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemulihan kesehatan, trauma, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi ke masyarakat.

b. Evaluasi Kinerja

Selama Tahun 2025 BP3MI DKI Jakarta melaksanakan fasilitasi rehabilitasi penanganan dan pendampingan terhadap 101 PMI dalam kondisi sakit yang difasilitasi perawatannya di RS Polri Kramat Jati.

- a) Melaksanakan/ menerima pendataan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia yang berminat mengikuti pemberdayaan;
- b) Melaksanakan/ menerima pendataan Calon Purna Pekerja Migran Indonesia asal Jakarta yang berminat mengikuti pemberdayaan ketika pulang/selesai kontrak;
- c) Melaksanakan zoom meeting terkait pemberdayaan seperti Desa Migran Emas

d) Melakukan beberapa upaya pemberdayaan sosial (rehabilitasi dan reintegrasi) diantaranya :

- Pekerja Migran Indonesia Sakit an Zahwa Nurul Hidayah (XE 668609) Pekerja Migran Indonesia asal negara penempatan Malaysia. Ia sakit luka digigit ular dan diabetes, ia tidak memiliki keluarga sehingga BP3M Jakarta berkoordinasi dengan Pemprov DK Jakarta untuk rehabilitasi lanjutan. Maka pada 8 Juli 2025, Zahwa dapat tinggal di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2 di Jakarta.
- Penanganan perawatan hingga pemakaman Pekerja Migran Indonesia Sakit an Elin Karlina Adjat Sudrajat (XE629429) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia dari Uni Emirat Arab. Elin dirawat sejak 10 Juli 2025 hingga berpulang pada 28 Juli 2025.
- Penanganan perawatan hingga proses pemulangan jenazah Pekerja Migran Indonesia Sakit an Hossaimah Bt Abdul Fattah (C5696795), Pekerja Migran Indonesia dari Taiwan. Hossaimah dirawat sejak 23 Juli 2025 hingga berpulang pada 31 Juli 2025 dan dipulangkan ke daerah asalnya di Jember.
- Penanganan PMI Sakt an Maryani yang dirawat karena gangguan psikologi dan tidak ditemukan pihak keluarganya. Pihak BP3MI DKI Jakarta telah memfasilitasi perawatannya di RS Polri Kramatjati dan membantu pengecekan identitas kependudukan di Kecamatan Ciracas. BP3MI DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk tempat tinggal PMI Maryani pasca perawatan (tinggal di panti sosial).

e) Melakukan beberapa upaya pemberdayaan sosial (rehabilitasi dan reintegrasi) diantaranya :

- Penanganan perawatan dan pendampingan Pekerja Migran Indonesia sakit selama bulan Tahunan (Januari - Desember) 2025 sebanyak 101 (seratus satu) orang. Adapun Pekerja Migran Indonesia Sakit yang diberikan pelayanan selama Tahun 2025.

2) **Capaian IKU “Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial”**

Tabel. II.6
 Capaian IKU “Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang di fasilitasi Rehabilitasi dan Reintegrasi “
 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Jumlah purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	20 Orang	20 Orang	100%

a. Informasi Kinerja

BP3MI DKI Jakarta menargetkan kegiatan Pemberdayaan bagi Pekerja Migran Indonesia Purna dan keluarganya pada tahun 2025 sebanyak 20 orang, angka tersebut merupakan dasar dari target Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Di Tahun 2025 juga terjadi perubahan Nomenklatur di kantor Pusat yang mana sebelumnya pada saat sebelum perubahan nomenklatur BP2MI menjadi Kementerian, Kegiatan Pemberdayaan berada di bawah Koordinasi Direktorat Pemberdayaan, saat ini setelah ada perubahan menjadi Kementerian, kegiatan Pemberdayaan berada di bawah Koordinasi Direktorat Kewirausahaan dan Pengembangan Usaha Produktif di bawah Direktorat Jendral Pemberdayaan.

b. Evaluasi Kinerja

Sampai dengan Tahun 2025 ini, pelaksanaan pelatihan kewirausahaan telah dilaksanakan. Tim Pemberdayaan dan Reintegrasi telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan Pemberdayaan PMI Purna dan keluarganya sebagai berikut:

- Melaksanakan/ menerima pendataan kepada Purna Pekerja Migran Indonesia yang berminat mengikuti pemberdayaan;
- Melaksanakan/ menerima pendataan Calon Purna Pekerja Migran Indonesia asal Jakarta yang berminat mengikuti pemberdayaan ketika pulang/selesai kontrak;

- Menghadiri dan mengikuti peluncuran Desa Migran Emas di Gresik pada 11 Juli 2025 secara langsung.
- Mengikuti peluncuran Desa Migran Emas di Lampung pada 31 Juli 2025 secara virtual.
- Terdapat 1 (satu) kegiatan ABT Pelatihan Pengembangan Usaha Produktif Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga (Program dari Direktorat KPUP KP2MI) yang dilaksanakan pada Rabu, 10 September s.d Jumat, 12 September 2025 di Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ciracas, Jakarta Timur. Total peserta sebanyak 20 orang;
- Terdapat 1 (satu) Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Pemberdayaan PMI Purna dan Keluarganya yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 19 September 2025 dengan total peserta sebanyak 20 orang.
 - a) Kegiatan ini dilaksanakan di Horison Ultima Menteng Jakarta Pusat pada Selasa, 16 September s.d Jumat, 19 September 2025.
 - b) Sebanyak 20 peserta pada kegiatan ini terdiri dari 19 orang yang merupakan Pekerja Migran Indonesia dan 1 orang Keluarga Pekerja Migran Indonesia.
 - c) Adapun sebaran domisi dari peserta diantaranya : 16 orang dari Jakarta Utara, 1 orang dari Jakarta Timur, 2 orang dari Kepulauan Seribu dan 1 orang dari Bekasi.
 - d) Adapun peserta kegiatan 16 orang perempuan dan 4 orang laki-laki.
 - e) Kedua puluh orang ini memiliki usaha diberagam bidang namun kebanyakan pada sektor makanan dan minuman.
 - f) Memberikan bantuan modal usaha bagi Purna Pekerja Migran Indonesia yang sudah memiliki usaha;
- Kegiatan monitoring dan evaluasi penerima bantuan Pengembangan Usaha Produktif Pekerja Migran Indonesia dan Keluarga di wilayah Jakarta Timur diantaranya:
 1. Nama : Diky Saputra
 No. KTP/Paspor : 3172042009010007/X 5708014
 Alamat : Jl. Kalibaru Barat II Cilincing Jakut RT.001 RW.010,
 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara
 Usaha : Nasi Warteg

2. Nama : Kurniasih
No. KTP/Paspor : 3172046610880004/B 5094342
Alamat : Jl. Kalibaru Barat RT.011 RW.004, Kalibaru,
Cilincing, Jakarta Utara
Usaha : Warung minuman (kopi the) dan makanan (seblak,
dimsum, dll)
3. Nama : Sartimah Hanafi
NIK/No. KTP : 3101015202820002
Alamat : Pulau Kelapa RT.004 RW.004, Pulau Kelapa,
Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
Telp/HP : 085693154617
Status : Purna Pekerja Migran/Keluarga
4. Nama : Nuraeni Mat Said
NIK/No. KTP : 3101016310880002
Alamat : Pulau Kelapa RT.003 RW.003, Pulau Kelapa,
Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu
Telp/HP : 085693154617
Status : Purna Pekerja Migran/Keluarga

3) Capaian IKU “Jumlah fasilitasi pelayanan keputungan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit, dan meninggal”

Tabel. II.7
Capaian IKU “Jumlah fasilitasi pelayanan keputungan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit, dan meninggal “ Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Jumlah purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial	223 Orang	535 Orang	239.91%

a. Informasi Kinerja

Pelayanan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia dari bekerja diluar negeri baik melalui Bandar Udara, Pelabuhan Laut, dan Pos Lintas Batas. Pemulangan Pekerja Migran Indonesia yang dipulangkan ini yang memenuhi prosedur (memiliki data diri yang lengkap) dapat pulang sendiri secara mandiri atau dipulangkan langsung oleh BP3MI Jakarta, dan juga dipulangkan oleh Stakeholder lain yang berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia.

b. Evaluasi Kinerja

Target Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Terkendala tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 223 orang.

BP3MI DKI Jakarta selama Tahun 2025, telah melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PMI bermasalah, sakit dan meninggal sebagai berikut:

- a) Selama tahun 2025 terdapat penanganan penerimaan dan fasilitasi keputungan PMIB hasil deportasi dan pencegahan sebanyak **434 orang PMIB** yang kemudian kami fasilitasi transit di Rumah Ramah / shelter BP3MI DKI Jakarta. Adapun bentuk fasilitasi yang dilakukan adalah dengan pendataan keputungan, pemberian konsumsi/permakanan, serta fasilitasi keputungannya.
- b) Selama tahun 2025 terdapat pelayanan PMI Sakit sebanyak 101 PMI, 8 PMI meninggal dunia setelah menjalani perawatan 6 PMI yang selesai

menjalani perawatan dan dinyatakan diperbolehkan untuk pulang ke daerah asal oleh Dokter RS Polri Kramat Jati.

- c) Dapat disimpulkan bahwa dalam bulan Desember 2025, Tim layanan Kepulangan dan Rehabilitasi telah melaksanakan penanganan PMI Bermasalah, Sakit dan Meninggal Dunia dengan data sebagai berikut:

No.	Jenis Penanganan	Jumlah
1	PMI Bermasalah (deportasi dan hasil pencegahan)	434
2	PMI Sakit	93
3	PMI Meninggal	8
	Total	535

5. **Capaian IKU pada Sasaran Program “Meningkatkan layanan Penempatan PMI Non Pemerintah”**

Tabel. II.8
Capaian IKU “Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS, dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan “ Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS, dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan	42.010 Orang	41.555 Orang	98,92%

a. Informasi Kinerja

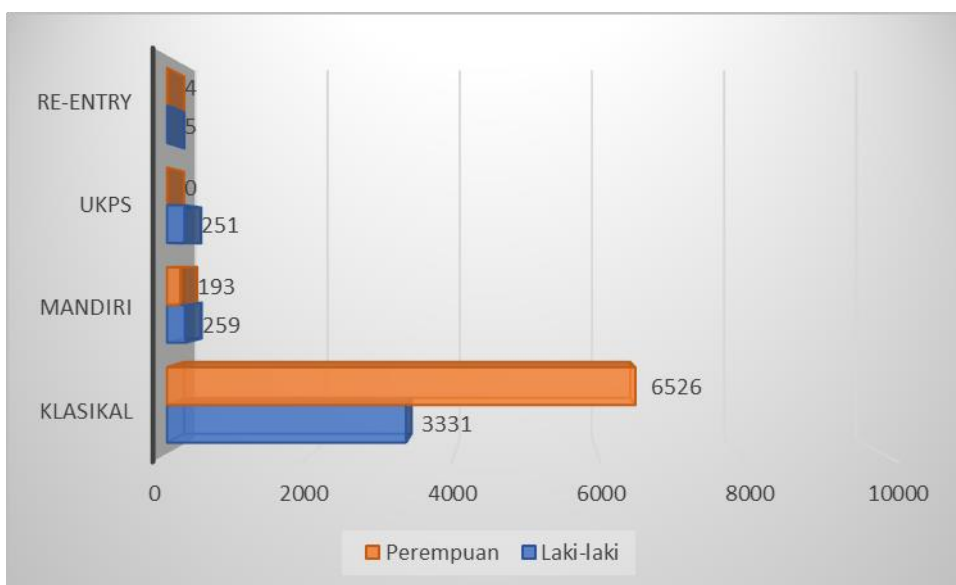
Penempatan Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional dimaksudkan adalah Pekerja Migran Indonesia yang memenuhi prosedur (memiliki keahlian dan sertifikat) serta terdata di SISKOP2MI, baik yang ditempatkan oleh

pemerintah maupun non pemerintah. Sedangkan untuk mengukur indikator kinerja ini berdasarkan realisasi jumlah Pekerja Migran Indonesia terampil dan profesional yang telah ditempatkan oleh BP3MI DKI Jakarta Tahun 2025 atau Peningkatan jumlah penempatan ditunjukkan dengan penentuan target yang meningkat setiap tahun.

b. Evaluasi Kinerja

Target Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 42.010 orang. Adapun realisasi PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan pada Tahun 2025 sebanyak 41.555 orang, angka tersebut menunjukkan adanya Penurunan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2024 yang jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia sebanyak 42.144 orang, angka tersebut menunjukkan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2025

Grafik II.I
Grafik Data Layanan Verifikasi Dokumen CPMI
Tahun 2025



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2025 mengalami penurunan setiap tahunnya.

Proses penempatan pada Tahun 2025 memasuki periode normal dimana

mekanisme penempatan kembali berjalan seperti biasanya, dari sisi regulasi sudah tidak ada lagi daftar negara-negara yang tidak boleh menjadi negara tujuan penempatan, selain itu pasca pandemi banyak masyarakat yang menjadikan Pekerja Migran Indonesia sebagai alternatif pilihan untuk bekerja yang dapat memulihkan kondisi ekonomi.

Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara prosedural, BP3MI DKI Jakarta tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan suatu kerja bersama serta dukungan berbagai pihak terkait yang pelaksanaannya saat ini dikoordinir oleh Tim Pengelolaan Kelembagaan di Bidang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BP3MI DKI Jakarta Nomor: SK.08/BP3MI8/HK.05/I/2024 tertanggal 01 Januari 2024 ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hal :

1. kegiatan sosialisasi; dan
2. kegiatan *job fair*.

Dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik dalam rangka mewujudkan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BP3MI DKI Jakarta, serta untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan, BP3MI DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman dengan mitra Kerjasama dengan Komisi IX DPR RI. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem tatap muka dengan peserta di setiap lokasi sebanyak 250 peserta, dengan mengundang narasumber dari DPR RI, BP2MI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta PMI Purna. Materi kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri dan Migrasi Aman di wilayah DKI Jakarta berupa :

- a. Hal yang menjadi faktor pendorong dan penarik bekerja ke luar negeri;
- b. Skema penempatan
- c. Pengenalan peluang kerja luar negeri per kawasan
- d. rekomendasi negara tujuan penempatan dan sektor jabatan
- e. Mekanisme / alur proses penempatan secara prosedur
- f. Mekanisme pelindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dalam tahapan sebelum, selama dan setelah bekerja.

Selama Tahun 2025 pelaksanaan kegiatan sosialisasi Peluang Kerja Luar Negeri

dan Migrasi Aman telah dilaksanakan di 12 lokasi dengan total peserta sebanyak 3.000 peserta. (daftar terlampir)

Selain melaksanakan kegiatan sosialisasi reguler bekerjasama dengan DPR RI, BP3MI DKI Jakarta juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMI Nonprosedural yang berkolaborasi dengan institusi Pendidikan, komunitas pemerhati PMI, asosiasi dan masyarakat sipil. Selama Tahun 2025 pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pencegahan PMI Nonprosedural telah dilaksanakan di 13 lokasi dengan jumlah peserta sebanyak 1.550 peserta. (daftar terlampir)

Layanan Konsultasi Publik luar jaringan (Unit Pelayanan Publik) Unit Layanan Publik (UPP) adalah desk layanan di BP3MI DKI Jakarta untuk melayani konsultasi dan pemberian informasi kepada masyarakat yang datang ke kantor BP3MI DKI Jakarta untuk pelayanan informasi peluang kerja luar negeri / jobs info, layanan penempatan, layanan pengaduan, serta layanan PPID. BP3MI DKI Jakarta membuka layanan konsultasi publik secara tatap muka di UPP setiap hari kerja Senin – Kamis pada pukul 08.00 – 16.30 dan hari Jumat pada pukul 08.00 – 17.00 WIB.

Selama Tahun 2025 terdapat 1.005 pencari kerja yang telah diberikan layanan konsultasi publik melalui UPP.

6. Capaian IKU pada Sasaran Program **“Meningkatkan Pengawasan Jaminan Sosial”**

Tabel. II.9
Capaian IKU “Fasilitasi klaim jaminan sosial oleh CPMI dan PMI”
Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Fasilitasi Klaim jaminan Sosial oleh CPMI dan PMI	100%	100%	100%

a. Informasi Kinerja

BP3MI Jakarta berupaya untuk membantu memfasilitasi proses Klaim Jaminan Sosial Ketenagakerjaan PMI, fasilitasi proses dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan baik di Pusat maupun di Cabang. BP3MI Jakarta juga memfasilitasi klaim jaminan sosial terhadap PMI bagi pra, masa, dan purna berdasarkan pengaduan dan permohonan yang dilakukan PMI yang bersangkutan dan ahli waris.

b. Evaluasi Kinerja

Persentase fasilitasi Klaim jaminan sosial oleh CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI Jakarta dihitung dari klaim jaminan sosial yang selesai difasilitasi dan dilayani oleh BP3MI Jakarta. Pada tahun 2025 klaim jaminan sosial CPMI dan PMI yang dilayani oleh BP3MI Jakarta yakni 100% karena dari 11 klaim jaminan sosial telah diselesaikan.

7. Capaian 3 IKU pada Sasaran Program “Meningkatkan Kapasitas Supply”**1) Capaian IKU “Data Supply”**

Tabel. II.10
Capaian IKU “Data Supply”
Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target	Realisasi Triwulan III	Capaian %
Data Supply	1000 Data	1905 data	190,5%

a. Informasi Kinerja

Data supply yang dimaksudkan yakni data perkiraan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) berpotensi atau berminat bekerja di luar negeri. Data ini mencakup mereka yang telah bekerja di luar negeri, sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang tertarik untuk bekerja di luar negeri di masa depan.

b. Evaluasi Kinerja

Pada Tahun 2025 BP3MI Jakarta menargetkan data supply merupakan indikator kinerja utama yang baru terbentuk dalam renstra yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari target sebanyak 1000 data pada tahun 2025, di Tahun 2025 realisasi data supply di BP3MI Jakarta sebanyak 1.905 orang yang terdata pada saat pelaksanaan kegiatan Jobfair yang diselenggarakan di beberapa tempat.

2) Capaian IKU “Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah”

Tabel. II.11
Capaian IKU “Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah”
Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah	500 orang	1872 orang	374.4 %

a. Informasi Kinerja

Verifikasi dokumen penempatan pemerintah adalah proses pengecekan dan validasi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memastikan kelengkapan dan keasliannya sebelum seorang pekerja migran Indonesia (PMI) bisa ditempatkan di negara tujuan melalui skema penempatan pemerintah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa PMI yang ditempatkan memenuhi persyaratan dan memiliki dokumen yang sah. Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah di BP3MI DKI Jakarta memiliki beberapa skema penempatan diantaranya skema G to G dan SP2T Taiwan.

b. Evaluasi Kinerja

Target Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah di BP3MI DKI Jakarta tahun 2025 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 500 orang. Kegiatan verifikasi dokumen penempatan pemerintah di BP3MI DKI Jakarta pada Tahun 2025 sebanyak 1.872 Orang.

3) Capaian IKU “Pemenuhan Syarat pengusulan WBK/WBBM”

Tabel. II.12

Capaian IKU “Pemenuhan Syarat pengusulan WBK/WBBM”

Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Pemenuhan Syarat pengusulan WBK/WBBM	80%	-	-

a. Informasi Kinerja

Pembangunan Zona Integritas didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas (ZI) adalah strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Tujuan utama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM adalah untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun 6 (enam) area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas, yaitu :

1. Area Manajemen perubahan,
2. Area Penataan Tatalaksana,
3. Area Penataan Manajemen SDM,
4. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
5. Area Penguatan Pengawasan, dan
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Evaluasi Kinerja

Pada Tahun 2025 ini BP3MI DKI Jakarta belum memperoleh nilai ZI karena sedang tahap persiapan pelaksanaan ZI dan pengumpulan evidence.

8. Capaian IKU pada Sasaran Program “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Kolaboratif”

Tabel. II.13
 Capaian IKU “Nilai Pengawasan Kearsipan Internal”
 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	75 Nilai	-	-

a. Informasi Kinerja

Nilai pengawasan kearsipan internal merupakan bagian penting dalam penilaian kinerja pengelolaan arsip di instansi pemerintah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan arsip dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Nilai ini merupakan salah satu komponen penilaian dalam pengawasan kearsipan secara keseluruhan, dan memiliki porsi yang signifikan dalam menentukan kategori atau opini akhir.

b. Evaluasi Kinerja

Nilai pengawasan kearsipan internal di Tahun 2025 belum terealisasi karena belum dilaksanakan.

9. Capaian IKU pada Sasaran Program “Membangun Sistem Anggaran yang Optimal”

Tabel. II.14

Capaian IKU “Nilai Kinerja Anggaran”

Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian %
Nilai Kinerja Anggaran	Baik	Baik	83.97%

a. Informasi Kinerja

Capaian Kinerja anggaran merupakan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. Capaian kinerja anggaran ini juga merupakan tolak ukur keberhasilan suatu KL/lembaga untuk meningkatkan kinerjanya agar mencapai target yang optimal. Nilai capaian kinerja anggaran diperoleh melalui website SMART Kemekeu.

b. Evaluasi Kinerja

Target terhadap Nilai Capaian Kinerja Anggaran pada tahun 2025 yang tertuang dalam perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah kategori “Baik” atau 90%-95%. Adapun realisasi pada tahun 2025 sebesar 83,97% atau mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebanyak 83.97%.

C. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan kegiatan guna pencapaian sasaran tahun 2025, BP3MI Jakarta didukung dengan pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA – 104.01.2.426349/2025, tanggal 02 Desember 2024 sebesar **Rp14.107.139.000,- (Empat belas miliar seratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)**. Anggaran tersebut bersumber dari Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Program Dukungan Manajemen. Untuk mengukur tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian sasaran, maka

dilakukan perbandingan antara penyerapan anggaran dengan pencapaian kinerja pada setiap sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel. II.15
Capaian Anggaran dan Kinerja
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Tahun 2025	%	Rata-rata Capaian Tahun 2025 (%)
1	Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	Layanan Penanganan Permasalahan dari jumlah pengaduan masuk yang difasilitasi oleh BP3MI	7,022,542,000	6,738,712,639	95.96%	70%	36%	36%	
		Pengaduan yang diproses dan dilayani berbasis SSKO P2MI yang difasilitasi oleh BP3MI				100%	100%	100%	
		Implementasi Kerjasama				80%	100%	100%	
		Jumlah Purna Pekerja Migran Indonesia yang mengalami permasalahan yang difasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi				20 Orang	101 Orang	505%	

No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Tahun 2025	%	Rata-rata Capaian Tahun 2025 (%)
		Jumlah Purna pekerja Migran Indonesia dan keluarga yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan ekonomi dan sosial				20 Orang	20 Orang	100%	184,47%
		Jumlah Fasilitasi Pelayanan kepulauan Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah, sakit dan meninggal				223 Orang	535 orang	239.91 %	
		Jumlah PMI yang ditempatkan oleh P3MI, UKPS dan Perseorangan yang mendapatkan layanan penempatan				42.010 Oran	41.555 Orang	98.92%	
		Fasilitasi Klaim Jaminan sosial oleh CPMI dan PMI				100%	100%	100%	
		Data Supply				1000 data	1.905 data	190,5 %	

No	Sasaran Strategis	IKU	Anggaran (Rp)			Kinerja			
			Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi Tahun 2025	%	Rata-rata Capaian Tahun 2025 (%)
		Calon PMI yang mengikuti verifikasi dokumen penempatan pemerintah				500 orang	1872 Orang	374,4%	
		Pemenuhan syarat pengusulan WBK/WBBM				80%	-	-	
2	Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan pada BP2MI	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	3,796,417,000	3,690,261,342	97.20 %	75	-	-	83,97%
		Nilai Kinerja Anggaran				Baik	Baik	83.97%	

BP3MI DKI Jakarta telah melakukan revisi anggaran sebanyak 6 (enam) kali dengan pengurangan pagu anggaran yang semula **Rp14.107.139.000,- (Empat belas miliar seratus tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)**. Menjadi **Rp. 10.818.959.000,- (Sepuluh juta delapan ratus delapan belas sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)**. Adapun rincian revisi anggaran sebagai berikut :

- 1) Revisi ke-1 tanggal 21 Februari 2025
- 2) Revisi ke-2 tanggal 17 Maret 2025
- 3) Revisi ke-3 tanggal 27 Maret 2025
- 4) Revisi ke-4 tanggal 1 Mei 2025
- 5) Revisi ke-5 tanggal 6 Agustus 2025
- 6) Revisi ke-6 tanggal 4 September 2025

- 7) Revisi ke-7 tanggal 20 Oktober 2025
- 8) Revisi ke-8 tanggal 13 November 2025
- 9) Revisi ke-9 tanggal 17 November 2025
- 10) Revisi ke-10 tanggal 14 Desember 2025

Sampai dengan akhir tahun 2025 telah terealisasi anggaran BP3MI Jakarta sebesar **Rp 10,428,973,981,- (Sepuluh juta empat ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus delapan puluh satu rupiah)** atau sebesar **96,40%** dan sisa anggaran sebesar **Rp389,985,019,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu sembilan belas rupiah).**

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disampaikan bahwa pada kegiatan “Peningkatan Fasilitas Pelayanan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia” tercapai sebesar 184,47% adapun anggaran yang terserap adalah 95,96%. Sementara itu pada kegiatan “Penyelenggaraan Kegiatan Dukungan pada BP3MI” tercapai sebesar 83,97% dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 97,20%.

Melihat capaian pada tabel di atas, secara kinerja BP3MI DKI Jakarta sudah melaksanakan kegiatan secara optimal, efektif, dan efisien di Tahun ini. Hal ini akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga bila ada kendala dapat diselesaikan secara cepat dan tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Permasalahan

1. Target penempatan yang cukup tinggi pada tahun 2025 tidak diimbangi dengan jumlah manpower yang mendukung;
2. Kurang optimalnya kegiatan penyebarluasan informasi melalui media social akibat tidak tersedianya pegawai yang benar-benar focus pada bidang tersebut;
3. Penyebarluasan informasi secara massif mengenai program-program KP2MI yang selaras dengan program kerja Presiden, diantaranya migrant center, desa migran emas, SMK Go Global dll.
4. Kendala dalam melakukan pencegahan penempatan PMI illegal akibat Jumlah Informasi yang masih terbatas baik dari sarana layanan pengaduan dan hotline BP3MI DKI Jakarta maupun informasi dari pihak luar (NGO/LSM dll).
5. Penerimaan pengaduan dari berbagai sumber dirasa belum optimal. Hal ini membuat masih ada kasus yang belum selesai diproses pada tahun 2025.

B. Tindak Lanjut dan Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan/kendala yang muncul berikut adalah hal-hal yang telah dilakukan BP3MI DKI Jakarta:

1. BP3MI DKI Jakarta menambah jumlah pegawai yang dijadikan verifikator serta melaksanakan bimbingan teknis kepada verifikator supaya kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. BP3MI DKI Jakarta telah mengusulkan penambahan pegawai yang akan focus pada tugas kehumasan;
3. Penggunaan social media secara massif untuk menyebarkan informasi serta penyelenggaraan rapat koordinasi dengan stakeholder di bidang pelatihan dan vokasi untuk mengenalkan program-program KP2MI;
4. BP3MI DKI Jakarta telah aktif menjalin koordinasi dengan dengan Unit PPA Polda Metro Jaya serta dengan 5 Polres yang berada di wilayah Polda Metro Jaya serta dengan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya dalam penguatan diseminasi informasi pencegahan PMI illegal di wilayah DKI Jakarta;
5. Membentuk hotline whatsapp yang khusus menangani pengaduan.

Jakarta, Februari 2026

KEPALA

Dr. ARMAN MUIS, SH, S.I.K, M.M

Kombes Pol NRP 77101056